



LAPORAN KEUANGAN *AUDITED* TAHUN 2023

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan *Audited* T.A. 2023

Laporan Keuangan *Audited* T.A. 2023 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran *Audited* T.A. 2023 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja untuk periode 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023. Realisasi Penerimaan Negara untuk periode tersebut berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp961.802.504,00. Realisasi Belanja Negara pada periode tersebut sebesar Rp426.960.091.164,00 atau mencapai 99.28% dari alokasi anggaran sebesar Rp430.076.132.000,00.

2. NERACA

Neraca *Audited* T.A. 2023 menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.016.526.861.275,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.554.612.354,00; Aset Tetap (*netto*) sebesar Rp988.743.558.577,00; dan Aset Lainnya (*netto*) sebesar Rp26.228.690.344,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.054.835.281,00 dan Rp1.013.472.025.994,00 sehingga jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp1.016.526.861.275,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional *Audited* T.A. 2023 menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pada periode 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023, Pendapatan-Operasional sebesar Rp8.560.000,00. Beban Operasional sebesar Rp453.780.642.748,00. Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar sebesar

Rp258.110.374,00. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp3.658.987.505,00. Terdapat Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp1.648.350,00 sehingga jumlah surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp3.915.449.529,00. Tidak terdapat surplus/defisit dari Pos-Pos Luar Biasa maka entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp449.856.633.219,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.038.661.838.614,00 dikurang Defisit-LO sebesar (Rp449.856.633.219,00) kemudian dikurangi dengan Koreksi Nilai Aset non Revaluasi sebesar (Rp1.331.468.061,00). Transaksi Antar Entitas sebesar Rp425.998.288.660,00. Dengan demikian terjadi penurunan Ekuitas sebesar (Rp25.189.812.620,00) sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.013.472.025.994,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	PERIODE S.D 31 DESEMBER 2023		% THD	PERIODE S.D 31 DESEMBER 2022
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
I. Pendapatan Perpajakan		-	-	-	-
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.1	-	961.802.504,00	100,00	725.195.549,00
III. Pendapatan Hibah		-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		-	961.802.504,00	100,00	725.195.549,00
B. Belanja Negara	B.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat					
1. Belanja Pegawai	B.2.1	49.808.139.000,00	49.785.306.948,00	99,95	48.396.885.911,00
2. Belanja Barang	B.2.2	367.678.425.000,00	366.605.006.974,00	99,71	370.453.771.733,00
3. Belanja Modal	B.2.3	12.589.568.000,00	10.569.777.242,00	83,96	5.799.436.490,00
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa		-	-	-	-
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)		430.076.132.000,00	426.960.091.164,00	99,28	424.650.094.134,00
C. Pembiayaan		-	-	-	-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1	933.799.060	
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.3	24.873.281,00	149.206.554,00
Persediaan	C.1.4	595.940.013,00	664.123.670,00
JUMLAH ASET LANCAR		1.554.612.354,00	813.330.224,00
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	695.921.837.000,00	695.921.837.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	409.251.540.857,00	413.343.852.484,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	230.609.031.519,00	221.473.664.369,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	78.380.837.756,00	78.380.837.756,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	3.600.000,00	3.600.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2.6	785.702.500,00	1.616.502.500,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(426.208.991.055,00)	(408.359.787.493,00)
JUMLAH ASET TETAP		988.743.558.577,00	1.002.380.506.616,00
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tidak Berwujud	C.3.1	230.979.441.078,00	230.086.063.078,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.2	1.374.916.000,00	0,00
Aset Lain-lain	C.3.3	18.855.111.626,00	14.391.732.728,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.4	(224.980.778.360,00)	(208.607.452.478,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		26.228.690.344,00	35.870.343.328,00
JUMLAH ASET		1.016.526.861.275,00	1.039.064.180.168,00
KEWAJIBAN	C.4		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4.1		
Utang Pada Pihak Ketiga	C.4.2	2.064.636.221,00	402.341.554,00
Hibah yang Belum Ditagihkan	C.4.4	56.400.000,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		933.799.060,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		3.054.835.281,00	402.341.554,00
JUMLAH KEWAJIBAN		3.054.835.281,00	402.341.554,00
EKUITAS	C.5		
Ekuitas	C.5	1.013.472.025.994,00	1.038.661.838.614,00
JUMLAH EKUITAS		1.013.472.025.994,00	1.038.661.838.614,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.016.526.861.275,00	1.039.064.180.168,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan PNBPN Lainnya	D.1	8.560.000,00	5.295.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		8.560.000,00	5.295.000,00
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2.1	50.052.723.948,00	46.243.017.662,00
Beban Persediaan	D.2.2	1.251.063.678,00	1.641.327.558,00
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	244.731.036.263,00	257.589.343.381,00
Beban Pemeliharaan	D.2.4	14.552.398.734,00	14.858.982.619,00
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	106.480.688.546,00	96.230.081.445,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	36.712.731.579,00	42.654.586.193,00
JUMLAH BEBAN		453.780.642.748,00	459.217.338.858,00
SURPLUS/(DEFISIT)DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(453.772.082.748,00)	(459.212.043.858,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.1	258.110.374,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.4.1	3.658.987.505,00	3.763.737.553,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.4.2	1.648.350,00	3.497.000,00
JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		3.915.449.529,00	3.760.240.553,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	D.5	(449.856.633.219,00)	(455.451.803.305,00)
SURPLUS/DEFISIT LO		(449.856.633.219,00)	(455.451.803.305,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
EKUITAS AWAL	E.1	1.038.661.838.614,00	1.072.230.001.317,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(449.856.633.219,00)	(455.451.803.305,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(1.331.468.061,00)	(2.041.257.983,00)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		(1.331.468.061,00)	(2.041.257.983,00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	425.998.288.660,00	423.924.898.585,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(25.189.812.620,00)	(33.568.162.703,00)
EKUITAS AKHIR	E.6	1.013.472.025.994,00	1.038.661.838.614,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan *Audited* T.A. 2023

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Penjelasan Umum

Laporan Keuangan *Audited* T.A. 2023

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

BNPT merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan menyebutkan bahwa BNPT memiliki peranan penting dalam penanggulangan terorisme. BNPT diposisikan sebagai pusat pengendalian krisis manakala terjadi tindak pidana terorisme yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah – langkah penanganan krisis termasuk pengerahan sumber daya dalam penanggulangan terorisme. Sebagai bagian dari fasilitas Presiden, BNPT dituntut untuk dapat memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dari hasil perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Kontribusi BNPT tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah mewujudkan rasa aman dan nyaman di masyarakat dari ancaman terorisme. Kondisi yang kondusif tersebut akan memberikan kontribusi penting bagi proses penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi BNPT Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

“Negara dan Masyarakat Aman dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”

Visi BNPT diuraikan ke dalam beberapa misi. Misi dalam konteks penanggulangan terorisme, BNPT melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: “Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga”, sehingga Misi BNPT Tahun 2021-2024 adalah perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dari ancaman maupun tindak pidana terorisme, melalui:

1. Implementasi kebijakan penanggulangan terorisme terintegrasi secara harmonis berbasiskan penelitian.
2. Melaksanakan tindakan pre-emptif dan preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme.
3. Optimasi penegakan hukum dan penanganan krisis secara cepat dan tepat dalam meminimalisasi dampak dari tindak pidana terorisme.
4. Melaksanakan pemulihan korban tindak kejahatan secara optimal.
5. Deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme dan orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme.
6. Kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme.
7. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang profesional.

BNPT terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Utama dan 3 (tiga) Deputi, serta 1 (satu) Inspektur, yaitu:

1. Sekretaris Utama

Mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

2. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi

Mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi.

3. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

Mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang penindakan dan pembinaan kemampuan.

4. Deputi Bidang Kerjasama Internasional

Mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang kerjasama internasional dalam rangka penanggulangan terorisme.

5. Inspektorat

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BNPT dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan BNPT.

Organisasi dan Tata Kerja BNPT diatur dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT. Susunan Organisasi dan Pejabat BNPT per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Susunan Organisasi dan Pejabat BNPT

NO	JABATAN	NAMA
1.	Kepala BNPT	Komjen Pol. Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si.
2.	Sekretaris Utama (membawahi 2 Biro)	Bangbang Surono, Ak., M.M., CA.
3.	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi (membawahi 3 Direktorat)	Brigjen TNI Roedy Widodo
4.	Deputi Bidang Penindakan, Pembinaan Kemampuan, dan Penegakan Hukum (membawahi 3 Direktorat)	Irjen Pol. Ibnu Suhaendra, S.I.K.
5.	Deputi Bidang Kerjasama Internasional (membawahi 3 Direktorat)	Andhika Chrisnayudhanto, S.I.P., S.H., M.A.
6.	Inspektur	Catur Iman Pratignyo, S.E.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BNPT didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 713 orang yang diuraikan menurut jabatan sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Pegawai BNPT

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Pimpinan Tinggi Utama	1
2	Eselon I	4
3	Eselon II	11
4	Eselon III	22
5	Eselon IV	22
6	Jabatan Fungsional Ahli Madya	7
7	Jabatan Fungsional Ahli Muda	41
8	Jabatan Fungsional Ahli Pertama	71
9	Jabatan Fungsional Terampil	11
10	PNS	246
11	NON PNS	95
12	PPPK	86
13	PPNPN	96
TOTAL		713

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan *Audited* T.A. 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BNPT. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada K/L.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

BNPT menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BNPT dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BNPT adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan di realisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Perhitungan Penyisihan

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap**b. Aset Tetap**

- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat *netto* yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang masa manfaat dalam rangka amortisasi barang milik negara berupa aset tak berwujud pada entitas pemerintah pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri,	10
Hak Ekonomi Lembaga, Penyiaran, Paten Biasa,	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas	25
Hak Cipta atas Ciptaan Golongan II, Hak Ekonomi Pelaku	50
Hak Cipta atas Ciptaan Golongan I	70

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- a. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Penjelasan Atas Pos - Pos Realisasi Anggaran

Laporan Keuangan *Audited* T.A. 2023

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2023 BNPT menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA – 113.01.1.679279/2023 tanggal 30 November 2022 sebesar Rp431.167.127.000,00. Anggaran BNPT mengalami *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga T.A. 2023 sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dengan Nomor S-557/MK.02/2023 pada tanggal 07 Juli 2023 sebesar Rp33.119.154.114,00 sehingga pagu anggaran yang bisa digunakan berubah menjadi Rp398.047.972.886,00. Kemudian, BNPT mendapat relaksasi anggaran *Automatic Adjustment* T.A. 2023 oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp19.886.447.000,00 sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dengan Nomor S-275/MK.2/2023 pada tanggal 18 Agustus 2023. Pada tanggal 1 September 2023 BNPT menerima Pengesahan Revisi Anggaran dengan nomor surat S-406/AG/AG.5/2023 sehingga pagu anggaran BNPT menjadi Rp426.630.013.000,00. Kemudian, berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dengan Nomor S-380/MK.2/2023 pada tanggal 19 Oktober 2023, BNPT mendapat tambahan anggaran sebesar Rp3.446.119.000,00 sehingga pagu anggaran BNPT menjadi Rp430.076.132.000,00.

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan
Rp961.802.504,00 .

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp961.802.504,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6
Perbandingan Realisasi PNBP Lainnya
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	258.110.374,00	-	100,0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8.560.000,00	5.295.000,00	61,7
Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	17.269.157,00	-	100,0
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	45.000.000,00	(100,0)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	677.862.973,00	674.900.549,00	100,0
Pendapatan Negara Bukan Pajak	961.802.504,00	725.195.549,00	32,6

Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dibayarkan kepada negara sesuai dengan surat Persetujuan dari Kementerian Keuangan Nomor S-70/MK.6/KNL.0704/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara (berupa sebagian bangunan) yang dimaksud disewakan kepada Koperasi Indonesia Harmoni Sejahtera untuk jangka waktu sewa dari Bulan April 2023 sampai dengan Bulan Maret 2024, sebesar Rp8.560.000,00.

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL berupa pengembalian belanja sebesar Rp677.862.973,00. Rincian pengembalian belanja dapat dilihat pada lampiran.

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp258.110.374,00 berupa lelang kendaraan dinas;

- Bus 1 unit
- Minibus (roda 4) 1 unit
- Motor (roda 2) 16 unit

Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN adalah bonus dari pihak asuransi diakibatkan tidak dilakukannya claim asuransi atas pengamanan BMN berupa aset gedung/bangunan senilai Rp17.269.157,00.



B.2. Belanja

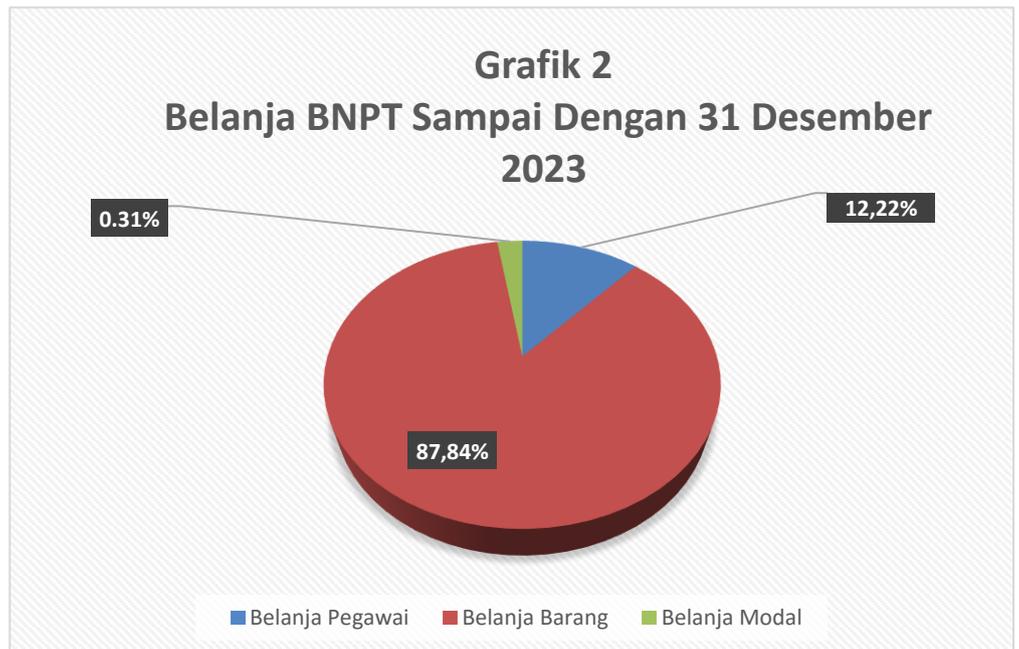
Realisasi Belanja
Rp426.960.091.164,00

Realisasi belanja BNPT periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp426.960.091.164,00 atau 99,28% dari anggaran belanja sebesar Rp430.076.132.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja tersaji sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Realisasi Belanja Per 31 Desember 2023

Uraian	T.A. 2023		REALISASI %
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Pegawai	49.808.139.000,00	49.791.042.645,00	99,97%
Belanja Barang	367.678.425.000,00	367.905.441.108,00	100,06%
Belanja Modal	12.589.568.000,00	10.569.777.242,00	83,96%
Total Belanja Kotor	430.076.132.000,00	428.266.260.995,00	99,58%
Pengembalian Belanja	-	1.306.169.831,00	
Total Belanja	430.076.132.000,00	426.960.091.164,00	99,28%

Komposisi realisasi per jenis belanja terhadap realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut:



Berdasarkan *pie chart* belanja BNPT untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023, diketahui total realisasi belanja BNPT adalah senilai Rp426.960.091.164,00 atau mencapai 99,28% dari total anggaran BNPT yaitu senilai Rp430.076.132.000,00. Total Realisasi Belanja BNPT terdiri atas Belanja Pegawai senilai Rp49.791.042.645,00 dengan persentase 99,97%, Belanja Barang senilai Rp367.905.441.108,00 dengan persentase 100,06% dan Belanja Modal senilai Rp10.569.777.242,00 dengan persentase 83,96% dari Total Realisasi Belanja.

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program dan jenis belanja Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Rincian Belanja Berdasarkan Program
Per 31 Desember 2023

PROGRAM	T.A. 2023			REALISASI %
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH DIREVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	
Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan	147.060.900.000,00	139.894.031.000,00	139.666.855.073,00	99,84%
Penanggulangan Terorisme Bidang Penindakan	90.373.653.000,00	86.082.872.000,00	85.968.677.171,00	99,87%
Penanggulangan Terorisme Bidang Kerjasama Internasional	16.860.719.000,00	19.903.213.000,00	19.885.521.495,00	99,91%
Dukungan Administrasi dan SDM	172.521.138.000,00	180.071.697.000,00	180.622.407.228,00	100,31%
Pengawasan Internal	2.350.717.000,00	2.124.319.000,00	2.122.800.028,00	99,93%
Pinjaman Luar Negeri Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	0,00%
Rupiah Murni Pendamping Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	0,00%
Total Belanja	431.167.127.000,00	430.076.132.000,00	428.266.260.995,00	99,58%
Pengembalian Belanja	-	-	1.306.169.831,00	
Total Belanja Netto	431.167.127.000,00	430.076.132.000,00	426.960.091.164,00	99,28%

Realisasi Belanja Berdasarkan Program untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dengan total realisasi senilai Rp426.960.091.164,00 atau sebesar 99,28% dari anggaran yang telah direvisi menjadi senilai Rp430.076.132.000,00. Terdapat Pengembalian Belanja senilai Rp1.306.169.831,00 yang rinciannya terdapat pada lampiran.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	49.785.306.948,00	48.396.885.911,00	2,87
Belanja Barang	366.605.006.974,00	370.453.771.733,00	(1,04)
Belanja Modal	10.569.777.242,00	5.799.436.490,00	82,26
Jumlah Belanja	426.960.091.164,00	424.650.094.134,00	0,54

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan menjadi Rp426.960.091.164,00 atau sebesar 0,54% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu senilai Rp424.650.094.134,00.

B.2.1 Belanja Realisasi Capaian Output Prioritas Nasional

Belanja Realisasi
Capaian Output PN
Rp47.673.115.475,00

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN T.A. 2023 dan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, maka dilakukan peningkatan kualitas informasi laporan keuangan terkait pengungkapan mengenai anggaran, realisasi dan pencapaian rincian output, khususnya target dan output dari Prioritas Nasional Tahun 2023, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah T.A. 2023. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa target output strategis yang diamanahkan kepada BNPT, yaitu Koordinasi Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah dalam Pencegahan Terorisme.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 pada Kementerian/Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional VII – Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Anggaran Prioritas Nasional (PN) BNPT adalah Rp47.735.867.000,00 dan total realisasi sebesar Rp47.673.115.475,00. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN BNPT adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Belanja Realisasi Capaian Output Prioritas Nasional

No.	Kode	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
1.	5096.PEB.001	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)	40.940.410.000	40.887.226.758	99,87%	Forum	35	35	100,00%
2.	5097.PEA.001	Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional	6.795.457.000	6.785.888.717	99,86%	Kegiatan	12	12	100,00%
TOTAL			47.735.867.000	47.673.115.475	99,86%				

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023, Program Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) memiliki Realisasi senilai Rp40.887.226.758,00 atau sebesar 99,87% dari pagu anggarannya yaitu senilai Rp40.940.410.000,00. Sedangkan untuk Program Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional memiliki Realisasi senilai Rp6.785.888.717,00 atau sebesar 99,86% dari pagu anggarannya yaitu senilai Rp6.795.457.000,00.

B.2.2 Belanja Realisasi Capaian Output Non-PN BNPT

Belanja Realisasi
Capaian Output Non PN
Rp380.593.145.520,00

Pagu Anggaran Non Prioritas Nasional (Non-PN) BNPT adalah Rp380.340.265.000,00 dan total realisasi sebesar Rp380.593.145.520,00 Program/Kegiatan Non-PN BNPT sebagai berikut:

Tabel 11
Belanja Realisasi Capaian Output Non Prioritas Nasional

No.	RO	Nomenklatur	Unit Kerja	2023 (Januari s.d Desember)							
				Target	Satuan	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
5096 - PENANGGULANGAN TERORISME BIDANG PENCEGAHAN								98.953.621.000	98.779.628.315	99,82%	
1.	5096.BDC.001	Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme	Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme	57	Orang	57	100%	6.048.410.000	6.035.498.769	99,79%	
2.	5096.BDC.002	Deradikalisasi Dalam Lapas	Subdirektorat Bina Dalam Lapas	55	Orang	55	100%	14.180.065.000	14.033.455.167	98,97%	
3.	5096.BDC.003	Deradikalisasi Luar Lapas	Subdirektorat Bina Masyarakat	45	Orang	45	100%	15.366.773.000	15.366.562.389	100,00%	
4.	5096.BDC.004	Deradikalisasi Khusus Bina Dalam Lapas Teroris	Subdirektorat Bina Dalam Lapsuster	45	Orang	45	100%	8.420.310.000	8.419.859.406	99,99%	
5.	5096.BHB.001	Pengawasan Terhadap Potensi Tindak Pidana Terorisme	Subdirektorat Pengawasan	2	Operasi	2	100%	2.893.772.000	2.890.871.112	99,90%	
6.	5096.BHB.002	Pelindungan Objek Vital, Transportasi, dan Lingkungan dari Tindak Pidana Terorisme	Subdirektorat Pengamanan Objek Vital dan Transportasi	3	Operasi	3	100%	2.097.854.000	2.124.219.817	101,26%	
7.	5096.BHB.003	Pengamanan Terhadap Fasilitas Publik dari Tindak Pidana Terorisme	Subdirektorat Pengamanan Lingkungan	3	Operasi	3	100%	3.041.512.000	3.031.567.141	99,67%	
8.	5096.QHB.001	Kegiatan Kontra Radikalisis	Subdirektorat Kontra Propaganda	56	Operasi	56	100%	46.904.925.000	46.877.594.514	99,94%	
9.	5096.CAF.001 *)	Countering Terrorism and Preventing Violent Extremism (Penanggulangan Terorisme dan Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan)	(Dana Pendamping PLN)	1	Paket	0	0%	0	0	0	
5097 - PENANGGULANGAN TERORISME BIDANG PENINDAKAN								79.287.415.000	79.182.788.454	99,87%	
1.	5097.ABE.001	Pengembangan Kebijakan Sistem Operasi Dalam Menghadapi Tindak Pidana Terorisme	Direktorat Pembinaan Kemampuan	3	Rekomendasi Kebijakan	3	100%	2.608.890.000	2.601.828.836	99,73%	
2.	5097.AEA.001	Koordinasi Dalam Penggunaan Kekuatan Terkait Tindak Pidana Terorisme	Subdirektorat Penggunaan Kekuatan	5	Kegiatan	5	100%	1.981.571.000	1.973.950.737	99,62%	
3.	5097.AEA.003	Pelindungan Appakkum Dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme	Subdirektorat Perlindungan Appakkum	16	Kegiatan	16	100%	4.975.680.000	4.948.197.807	99,45%	
4.	5097.AEA.004	Koordinasi Kasus Tindak Pidana Terorisme yang Berkekuatan Hukum Tetap	Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Appakkum dan Direktorat Penegakkan Hukum	110	Kegiatan	110	100%	12.426.076.000	12.391.170.642	99,72%	
5.	5097.BHB.001	Operasi Intelijen Jaringan Terorisme	Subdirektorat Intelijen	50	Operasi	50	100%	44.680.145.000	44.678.739.313	100,00%	
6.	5097.BHB.002	Operasi Pengendalian Krisis saat Tindak Pidana Terorisme Terjadi	Subdirektorat Intelijen	5	Operasi	5	100%	5.566.571.000	5.566.570.654	100,00%	
7.	5097.BHB.003	Operasi Intelijen Siber dan Teknologi Informasi	Subdirektorat Teknologi Intelijen	5	Operasi	5	100%	1.094.803.000	1.094.803.000	100,00%	
8.	5097.DCG.001	Pembinaan Aparat Pemerintah Dalam Menghadapi Tindak Pidana Terorisme	Subdirektorat Pelatihan	620	Orang	620	100%	5.953.679.000	5.927.527.465	99,56%	
5098 - PENANGGULANGAN TERORISME BIDANG KERJA SAMA INTERNASIONAL								19.903.213.000	19.885.521.495	99,91%	
1.	5098.ABE.001	Partisipasi Aktif BNPT di Forum Penanggulangan Terorisme Internasional serta Penguatan Perangkat Hukum Internasional, dan Perlindungan WNI dan BHI dari Ancaman Terorisme di Luar Negeri	Direktorat Perangkat Hukum Internasional dan Subdirektorat Perlindungan WNI dan Kepentingan Nasional di Luar Negeri	8	Rekomendasi Kebijakan	8	100%	5.029.644.000	5.029.384.546	99,99%	
2.	5098.AEC.001	Kerja Sama Bilateral dalam Penanggulangan Terorisme	Subdirektorat Kerjasama Asia Pasifik dan Afrika dan Subdirektorat Kerjasama Amerika dan Eropa	8	Kesepakatan	8	100%	8.428.110.000	8.427.678.617	99,99%	
3.	5098.AEC.002	Kerjasama Regional Multilateral dalam Penanggulangan Terorisme	Subdirektorat Kerjasama Regional dan Subdirektorat Kerjasama Multilateral	6	Kesepakatan	6	100%	6.445.459.000	6.428.458.332	99,74%	
5099 - DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN SDM								180.071.697.000	180.622.407.228	100,31%	
1.	5099.AEA.001	Sasaran wilayah pelibatan secara terpadu KL pelaksanaan program penanggulangan terorisme	Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat	22	Kegiatan	22	100%	19.721.999.000	19.689.870.712	99,84%	
2.	5099.AEA.002	Koordinasi Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Dalam Pencegahan Terorisme	Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat	3	Kegiatan	3	100%	3.654.269.000	3.654.260.220	100,00%	
3.	5099.AEA.003	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan	Direktorat Regional dan Multilateral	3	Kegiatan	3	100%	2.997.447.000	2.997.436.209	100,00%	
4.	5099.EBA.956	Layanan BMN	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	1	Layanan	1	100%	799.855.000	799.325.382	99,93%	
5.	5099.EBA.957	Layanan Hukum	Bagian Hukum, Humas, dan TI	1	Layanan	1	100%	2.162.636.000	2.162.630.018	100,00%	
6.	5099.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	Bagian Hukum, Humas, dan TI	1	Layanan	1	100%	22.582.219.000	22.630.334.366	100,21%	
7.	5099.EBA.959	Layanan Protokoler	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	1	Layanan	1	100%	1.166.092.000	1.166.067.557	100,00%	
8.	5099.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Bagian Kepegawaian	1	Layanan	1	100%	1.626.625.000	1.626.310.209	99,98%	
9.	5099.EBA.962	Layanan Umum	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	1	Layanan	1	100%	8.457.214.000	9.106.275.252	107,67%	
10.	5099.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Bagian Hukum, Humas, dan TI	1	Layanan	1	100%	2.214.195.000	2.200.673.915	99,39%	
11.	5099.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	Bagian Hukum, Humas, dan TI	1	Layanan	1	100%	53.136.000	52.910.000	99,57%	
12.	5099.EBA.994	Layanan Perkantoran	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	1	Layanan	1	100%	85.523.880.000	85.449.781.077	99,91%	
13.	5099.EBB.951	Layanan Sarana Internal	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	30	Unit	30	100%	10.230.350.000	10.224.079.242	99,94%	
14.	5099.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	Bagian Kepegawaian	250	Orang	250	100%	4.155.786.000	4.154.874.029	99,98%	
15.	5099.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Bagian Kepegawaian	60	Orang	60	100%	789.646.000	789.560.052	99,99%	
16.	5099.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat	4	Dokumen	4	100%	8.439.389.000	8.421.312.931	99,79%	
17.	5099.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat	5	Dokumen	5	100%	1.497.669.000	1.497.622.915	100,00%	
18.	5099.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	Biro Umum	20	Dokumen	20	100%	1.085.928.000	1.085.832.638	99,99%	
19.	5099.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	Bagian Kepegawaian	8	Dokumen	8	100%	2.402.493.000	2.402.490.253	100,00%	
20.	5099.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	5	Dokumen	5	100%	510.869.000	510.760.251	99,98%	
5729 - PENGAWASAN INTERNAL BNPT								2.124.319.000	2.122.800.028	99,93%	
1.	5729.EBD.965	Layanan Audit Internal	Inspektorat	5	Dokumen	5	100%	2.124.319.000	2.122.800.028	99,93%	
TOTAL								380.340.265.000	380.593.145.520	100,07%	

Realisasi Capaian Output Non-PN untuk Kedepatian Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi senilai Rp98.779.628.315,00 atau sebesar 99,82% dari jumlah pagu anggarannya yang senilai Rp98.953.621.000,00 .

Realisasi Capaian Output Non-PN untuk Kedepatian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan senilai Rp79.182.788.454,00 atau sebesar 99,87% dari jumlah pagu anggarannya yang senilai Rp79.287.415.000,00.

Realisasi Capaian Output Non-PN untuk Kedepatian Bidang Kerja Sama Internasional senilai Rp19.885.521.495,00 atau sebesar 99,91% dari jumlah pagu anggarannya yang senilai Rp19.903.213.000,00.

Realisasi Capaian Output Non-PN untuk Sekretariat Utama senilai Rp180.622.407.228,00 atau sebesar 100,31% dari jumlah pagu anggarannya yang senilai Rp180.071.697.000,00.

Realisasi Capaian Output Non-PN untuk Inspektorat senilai Rp2.122.800.028,00 atau sebesar 99,93% dari jumlah pagu anggarannya yang senilai Rp2.124.319.000,00.

B.2.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp49.785.306.948,00

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp49.785.306.948,00 dan Rp48.396.885.911,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	20.275.059.283,00	19.551.160.454,00	3,70
Uang Makan PNS	2.177.734.000,00	2.734.882.000,00	(20,37)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1.129.180.351,00	-	100,00
Belanja Uang Lembur	730.576.000,00	467.903.000,00	56,14
Belanja Tunjangan Khusus	25.478.493.011,00	25.877.330.801,00	(1,54)
Belanja Kotor	49.791.042.645,00	48.631.276.255,00	2,38
Pengembalian	5.735.697,00	234.390.344,00	(97,55)
JUMLAH	49.785.306.948,00	48.396.885.911,00	2,87

Pada tabel 12 Terlihat bahwa terdapat pengembalian Belanja Pegawai Tahun 2023 senilai Rp5.735.697,00, sehingga realisasi netto atas Belanja Pegawai yaitu senilai Rp49.785.306.948,00 atau 99,95% dari total anggaran belanja pegawai senilai Rp49.808.139.000,00.

B.2.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp366.605.006.974,00 .

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp366.605.006.974,00 dan Rp370.453.771.733,00.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	3.200.836.745,00	3.093.267.230,00	3,48
Belanja Barang Non Operasional	168.906.235.981,00	192.616.761.260,00	(12,31)
Belanja Barang Persediaan	1.189.212.791,00	1.842.369.133,00	(35,45)
Belanja Jasa dan Sewa	72.580.652.670,00	62.238.047.546,00	16,62
Belanja Pemeliharaan	14.592.040.922,00	14.789.772.063,00	(1,34)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	94.481.219.606,00	92.737.884.223,00	1,88
Belanja Perjalanan Luar Negeri	12.955.242.393,00	4.171.475.214,00	210,57
Jumlah Belanja Kotor	367.905.441.108,00	371.489.576.669,00	(0,96)
Pengembalian Belanja	1.300.434.134,00	1.035.804.936,00	25,55
Jumlah Belanja	366.605.006.974,00	370.453.771.733,00	(1,04)

Terdapat pengembalian belanja senilai Rp1.300.434.134,00. Sehingga realisasi netto atas Belanja Barang senilai Rp366.605.006.974,00 atau 99,71% dari jumlah anggaran senilai Rp367.678.425.000,00.

B.2.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp10.569.777.242,00

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.569.777.242,00 dan Rp5.799.436.490,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	563.619.892,00	4.656.852.140,00	(87,90)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.660.459.350,00		
Belanja Modal Lainnya	345.698.000,00	1.145.542.350,00	100,00
Jumlah Belanja Kotor	10.569.777.242,00	5.802.394.490,00	(82,16)
Pengembalian Belanja	-	2.958.000,00	-
Jumlah Belanja	10.569.777.242,00	5.799.436.490,00	(82,26)

Tidak terdapat pengembalian pada belanja modal, sehingga realisasi *netto* atas belanja modal senilai Rp10.569.777.242,00 atau 83,96% dari jumlah anggaran senilai Rp12.589.568.000,00.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

Laporan Keuangan *Audited* T.A 2023

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar
Rp1.554.612.354,00

Saldo Aset Lancar 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp1.554.612.354,00 dan Rp813.330.224,00 Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Aset Lancar

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas Lainnya dan Setara Kas	933,799,060.00	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	24,873,281.00	149,206,554.00
Persediaan	595,940,013.00	664,123,670.00
JUMLAH	1,554,612,354.00	813,330,224.00

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp933.799.060,00

C.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing masing sebesar Rp933.799.060,00 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran berupa pajak Tahun Anggaran 2023 yang dibayarkan pada tahun 2024. Rincian pajak terdapat pada lampiran.

Belanja Dibayar
Dimuka
Rp24.873.281,00

C.1.2 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp24.873.281,00 dan Rp149.206.554,00. Belanja dibayar dimuka pada tahun 2023, yaitu saldo RFID BBM Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional sebesar Rp24.873.281,00.

C.1.3 Persediaan

Persediaan
Rp595.940.013,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp595.940.013,00 dan Rp664.123.670,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16
Perbandingan Rincian Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Persediaan	31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Barang Konsumsi	353,332,618.00	397,120,347.00
Amunisi	183,951,000.00	239,895,000.00
Suku Cadang	1,329,500.00	275,000.00
Persediaan Lainnya (Obat)	57,326,895.00	26,833,323.00
Jumlah	595,940,013.00	664,123,670.00

C.2 Aset Tetap

Aset Tetap
Rp988.743.558.577,00

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp988.743.558.577,00 dan Rp1.002.380.506.616,00. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian saldo Aset Tetap dan Perbandingan Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji dalam rincian sebagai berikut

Tabel 17
Rincian Saldo Aset Tetap

No	Aset Tetap	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1	Tanah	695,921,837,000.00	695,921,837,000.00
2	Peralatan dan Mesin	409,251,540,857.00	413,343,852,484.00
3	Gedung dan Bangunan	230,609,031,519.00	221,473,664,369.00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	78,380,837,756.00	78,380,837,756.00
5	Aset Tetap Lainnya	3,600,000.00	3,600,000.00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	785,702,500.00	1,616,502,500.00
Jumlah		1,414,952,549,632.00	1,410,740,294,109.00
Akumulasi Penyusutan		(426,208,991,055.00)	(408,359,787,493.00)
Nilai Buku Aset Tetap		988,743,558,577.00	1,002,380,506,616.00

Tabel 18
Perbandingan Nilai Buku Aset Tetap

No	Aset Tetap	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	Kenaikan/Penurunan
1	Tanah	695.921.837.000,00	695.921.837.000,00	-
2	Peralatan dan Mesin	32.107.870.187,00	45.500.625.743,00	(13.392.755.556,00)
3	Gedung dan Bangunan	204.149.100.079,00	199.643.300.448,00	4.505.799.631,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	55.775.448.811,00	59.694.640.925,00	(3.919.192.114,00)
5	Aset Tetap Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	-
6	Konstruksi dalam pengerjaan	785.702.500,00	1.616.502.500,00	(830.800.000,00)
Jumlah		988.743.558.577	1.002.380.506.616	

Rincian Penyusutan Aset Tetap ada pada lampiran.

C.2.1 Tanah

Tanah
Rp695.921.837.000,00

Nilai perolehan aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp695.921.837.000,00 dan Rp695.921.837.000,00. Tanah yang dimiliki oleh BNPT terletak di Sentul di Jalan Anyar, Desa Tangkil, Sentul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat senilai Rp38.261.256.000,00 dan di Jalan S. Parman, Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, senilai Rp657.660.581.000,00. Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang tanah pada periode ini.

Peralatan dan Mesin
Rp409.251.540.857,00

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp409.251.540.857,00 dan Rp413.343.852.484,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 19
Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022		Rp 413,343,852,484.00
Mutasi tambah:		Rp 3,654,339,467.00
Pembelian	Dispenser	Rp 2,099,000.00
	Tablet PC	Rp 10,198,502.00
	Tablet PC	Rp 25,650,000.00
	Lemari Besi/Metal	Rp 14,100,000.00
	Filing Cabinet Besi	Rp 9,600,000.00
	Locker	Rp 17,400,000.00
	Kursi Besi/Metal	Rp 71,217,000.00
	Meja Rapat	Rp 80,280,000.00
	Meja Marmer	Rp 20,633,790.00
	Meja Makan Besi	Rp 13,941,600.00
	Camera Conference	Rp 17,000,000.00
	Tablet PC	Rp 35,492,000.00
	Lap Top	Rp 219,660,000.00
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Rp 6,375,000.00
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Rp 19,973,000.00
		Rp 563,619,892.00
Perolehan Lainnya	Switch (jaringan komputer)	Rp 518,650,000.00
	Acces Point	Rp 267,150,000.00
		Rp 785,800,000.00
Hibah	Kontainer	Rp 56,400,000.00
Penyelesaian Dgn KDP	Switch (jaringan komputer)	Rp 830,800,000.00
Reklasifikasi Masuk	A.C. Cassete	Rp 111,000,000.00
	Meja Kerja Kayu	Rp 611,545,000.00
		Rp 722,545,000.00
Koreksi atas Belanja Barang	Revitalisasi jaringan internet yang belum dikapitalisasi	Rp 691,399,575.00
		Rp 691,399,575.00
Koreksi atas Belanja Barang	Lampu Strobo	Rp 1,125,000.00
	Toa Sirine	Rp 2,650,000.00
		Rp 3,775,000.00

Mutasi kurang:		Rp 7,747,051,094.00
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Switch (jaringan komputer)	Rp 785,800,000.00
Koreksi reklas Peralatan dan Mesin	laptop yang sudah tidak digunakan (rusak berat) ke Aset Lainnya	Rp 6,961,251,094.00
Saldo per 31 Desember 2023		Rp 409,251,540,857.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023		Rp (377,143,670,670.00)
Saldo Buku per 31 Desember 2023		Rp 32,107,870,187.00

Gedung dan Bangunan
Rp230.609.031.519,00

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp230.609.031.519,00 dan Rp221.473.664.369,00. Terdapat mutasi tambah pada Gedung dan Bangunan diperiode ini sebesar Rp.9.135.367.150,00.

Tabel 20
Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	Rp 221,473,664,369.00
Mutasi tambah:	Rp 9,135,367,150.00
Pembelian	Rp -
Perolehan lainnya	Rp 396,802,800.00
Pengembangan Nilai Aset	Rp 8,738,564,350.00
Penyesesaian dengan KDP	Rp -
Mutasi kurang:	Rp -
Reksifikasi Keluar	Rp -
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 230,609,031,519.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp (26,459,931,440.00)
Saldo Buku per 31 Desember 2023	Rp 204,149,100,079.00

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp78.380.837.756,00

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp78.380.837.756,00 dan Rp78.380.837.756,00. Tidak terdapat mutasi tambah atau kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan pada periode ini.

Tabel 21
Mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	Rp 78,380,837,756.00
Mutasi tambah:	Rp -
Pembelian	Rp -
Reklasifikasi Masuk	Rp -
Pengembangan Nilai Aset	Rp -
Koreksi Nilai Revaluasi	Rp -
Mutasi kurang:	Rp -
Satkon	Rp -
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 78,380,837,756.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp (22,605,388,945.00)
Saldo Buku per 31 Desember 2023	Rp 55,775,448,811.00

Aset Tetap Lainnya
Rp3.600.000,00

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp3.600.000,00 dan Rp3.600.000,00 berupa buku koleksi perpustakaan. Tidak terdapat mutasi masuk dan kurang pada periode ini.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Rp785.702.500,00

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp785.702.500,00 dan Rp1.616.502.500,00 berupa jasa perencanaan Gedung Serba Guna BNPT. dan terdapat mutasi keluar senilai Rp830.800.000,00 berupa Revitalisasi Jaringan yang telah terpasang.

Terhadap saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berupa jasa perencanaan Gedung Serba Guna BNPT dalam proses koordinasi untuk menetapkan statusnya apakah dihentikan sementara atau dihentikan permanen, sehubungan pada lokasi yang sama ada perubahan rencana atas dasar kebutuhan organisasi, yaitu penambahan Pegawai BNPT sebanyak 300 orang dan pengembalian fungsi Gedung Pasopati sebagai Gedung Diklat, maka akan dibangun Gedung Operasional Kantor.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp.426.208.991.055,00

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing – masing Rp426.208.991.055,00 dan Rp408.359.787.493,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023

Tabel 22
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Buku per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	695,921,837,000.00	-	695,921,837,000.00
2	Peralatan dan Mesin	409,251,540,857.00	377,143,670,670.00	32,107,870,187.00
3	Gedung dan Bangunan	230,609,031,519.00	26,459,931,440.00	204,149,100,079.00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	78,380,837,756.00	22,605,388,945.00	55,775,448,811.00
5	Aset Tetap Lainnya	3,600,000.00	-	3,600,000.00
6	KDP	785,702,500.00	-	785,702,500.00
Jumlah		1,414,952,549,632.00	426,208,991,055.00	988,743,558,577.00

C.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya
RpRp26.228.690.344,00

Aset Lainnya merupakan Aset Pemerintah selain Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Piutang Jangka Panjang. Pada periode per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki Aset Lainnya sebesar Rp26.228.690.344,00 dan Rp35.870.343.328,00. Rincian Aset Lainnya terdapat pada lampiran.

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
RpRp230.979.441.078,00

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp230.979.441.078,00 dan Rp230.086.063.078,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik dengan perbandingan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Terdapat Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud pada periode ini senilai Rp893.378.000,00

Tabel 23
Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud (ATB)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022		Rp 230,086,063,078.00
Mutasi tambah:		Rp 893,378,000.00
Pembelian	Sistem Informasi Perpustakaan	159,218,000
	Portal Data BNPT	186,480,000
		Rp 345,698,000.00
Perolehan Lainnya	Aplikasi Pasti	205,000,000
	Aplikasi Dai	245,000,000
		Rp 450,000,000.00
Koreksi atas Belanja Barang	Aplikasi Sikepo	48,840,000
	Aplikasi SIP	48,840,000
		Rp 97,680,000.00
Mutasi kurang:		Rp -
Reksifikasi Keluar		Rp -
Saldo per 31 Desember 2023		Rp 230,979,441,078.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023		Rp (213,559,579,571.00)
Saldo Buku per 31 Desember 2023		Rp 17,419,861,507.00

C.3.2 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang dibatasi penggunaannya
Rp1.374.916.000,00

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya adalah dana yang terdapat pada RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) dengan nilai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 Sebesar Rp 1.374.916.000,00 dan Rp0,- RPATA adalah rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara, yang digunakan untuk pembayaran pekerjaan revitalisasi Gedung Biwara sesuai BAST/BAPP Nomor 04/BAST-PB/PPK-UKPBJ/BNPT/2529/12/2023 Tanggal 29-12-2023.

Aset Lain-Lain
Rp18.855.111.626,00

C.3.3 Aset Lain-Lain

Aset Lain – Lain adalah aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dengan nilai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp18.855.111.626,00 dan Rp14.391.732.728,00 terdapat kenaikan senilai Rp4.463.378.898,00, yang terdiri dari mutasi kurang senilai Rp2.509.722.198,00 dan mutasi tambah senilai Rp6.960.851.094,00. Mutasi kurang terdiri dari Aset berupa kendaraan dinas dan peralatan perkantoran sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) unit yang telah dihapuskan karena rusak berat melalui mekanisme lelang. Mutasi tambah terdiri dari aset berupa laptop yang sudah tidak digunakan (rusak berat) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) unit laptop.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp.224.980.778.360,00

C.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dan Amortisasi

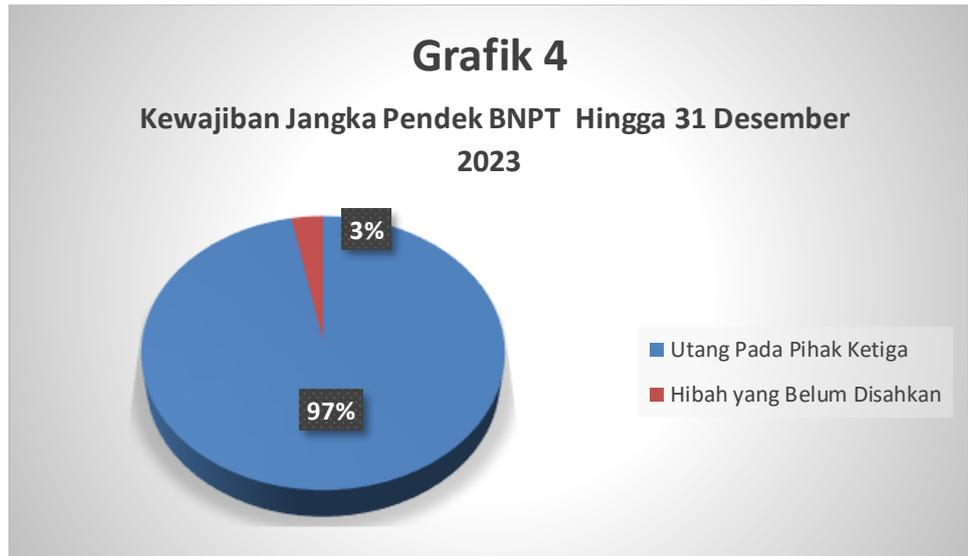
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada periode per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar (Rp. 224.980.778.360,00) dan (Rp208.607.452.478,00), merupakan amortisasi software dan penyusutan aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan.

C.4. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah pada masa yang akan datang.

C.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode.



Utang Pada Pihak
Ketiga
Rp2.064.636.221,00

C.4.2 Utang Pada Pihak Ketiga

Utang Pada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing–masing sebesar Rp2.064.636.221,00 dan Rp402.341.554,00. Berikut rincian Utang Pada Pihak Ketiga BNPT hingga 31 Desember 2023.

Tabel 24
Utang Pada Pihak Ketiga

Utang Pada Pihak Ketiga	
Uraian	Jumlah
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	461,875,000.00
Uang Makan PNS	381,437,000.00
Uang Makan P3K	80,438,000.00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	227,845,221.00
Langganan Listrik	225,499,014.00
Langganan Telkom	2,346,207.00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	1,374,916,000.00
TOTAL	2,064,636,221.00

Hibah yang Belum
Disahkan
Rp56.400.000,00

C.4.3 Hibah yang Belum Disahkan

Hibah yang Belum Ditagihkan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp56.400.000,00 dan Rp0,00. Hibah dalam proses pengesahan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berupa hibah kontainer dengan nomor surat hibah S-23/WPB.12/2023. Setelah proses pengesahan hibah selesai akan di lakukan pencatatan dalam Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024.

Ekuitas
Rp1.013.472.025.994,00

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing - masing sebesar Rp1.013.472.025.994,00 dan Rp1.038.661.838.614,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Penjelasan Atas Laporan Operasional

Laporan Keuangan *Audited* T.A 2023

D. PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

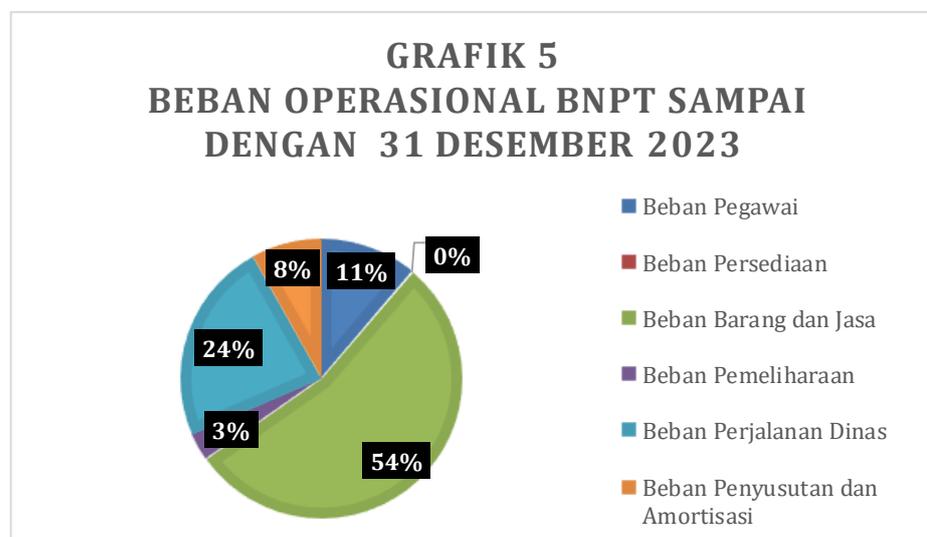
Pendapatan Negara
Bukan Pajak Lainnya
Rp8.560.000,00

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.560.000,00 dan Rp5.295.000,00. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya tersebut berasal dari Pendapatan Anggaran Lain-lain, yaitu pendapatan dari sewa tanah, gedung, dan bangunan.

D.2 Beban Operasional

Beban operasional adalah aset keluar atau munculnya utang selama periode di mana entitas memproduksi dan menyerahkan barang, memberikan jasa, atau melakukan aktivitas lain yang merupakan operasi pokok. Beban Operasional di BNPT mencakup:

- Beban Pegawai
- Beban Persediaan
- Beban Barang dan Jasa
- Beban Pemeliharaan
- Beban Perjalanan Dinas
- Beban Penyusutan dan Amortisasi



D.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp50.052.723.948,00

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp50.052.723.948,00 dan Rp46.243.017.662,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Tabel 25
Perbandingan Rincian Beban Pegawai
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	KENAIKAN (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	20.271.669.586,00	19.320.376.410,00	4,92
Uang Makan PNS	2.178.849.000,00	2.455.733.000,00	(11,28)
Beban Uang Lembur	725.738.000,00	467.224.700,00	55,33
Beban Tunjangan Khusus	24.683.772.320,00	23.999.683.552,00	2,85
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	1.124.777.351,00	-	100,00
Uang Makan PPPK	84.841.000,00	-	100,00
Beban Tunjangan Khusus PPPK	978.238.691,00	-	100,00
Beban Uang Lembur PPPK	4.838.000,00	-	100,00
JUMLAH	50.052.723.948,00	46.243.017.662,00	8,24

Terdapat selisih senilai Rp267.417.000,00,00 antara realisasi Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp49.785.306.948,00 dengan Beban Pegawai senilai Rp50.052.723.948,00. Hal ini dikarenakan adanya selisih antara uang makan PNS bulan Desember tahun 2022 yang dibayarkan menggunakan anggaran tahun anggaran 2023 sebesar Rp194.458.000,00 dan uang makan PNS dan PPPK bulan September sampai dengan November tahun 2023 yang dibayarkan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp 461.875.000,00. Masih Terdapat uang makan PPPK dan PNS bulan November dan PPPK bulan Desember tahun 2023 yang belum dicatat karena nilai pembayarannya masih belum bisa dipastikan.

Beban Persediaan
Rp1.251.063.678,00

D.2.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.251.063.678,00 dan Rp1.641.327.558,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Perbandingan Rincian Beban Persediaan
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	KENAIKAN (TURUN) %
Beban Persediaan konsumsi	1.051.483.655,00	1.291.349.518,00	(18,57)
Beban Persediaan amunisi	55.944.000,00	96.165.000,00	(41,82)
Beban persediaan lainnya	143.636.023,00	253.813.040,00	(43,41)
JUMLAH	1.251.063.678,00	1.641.327.558,00	(23,78)

Analisis perhitungan Beban Persediaan dikaitkan dengan realisasi Belanja Persediaan sebesar Rp1.189.212.791,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Analisis perhitungan Beban Persediaan

URAIAN	Nilai (Rp)
Saldo Awal Persediaan (termasuk persediaan untuk pemeliharaan, suku cadang, dan cukai/leges)	664.123.670,00
Ditambah pembelian barang persediaan tahun berjalan	1.189.212.791,00
Dikurangi Persediaan Akhir (termasuk persediaan untuk pemeliharaan, suku cadang, dan cukai/leges)	595.940.013,00
Dikurangi Beban Persediaan Suku Cadang	- 4.684.420,00
Dikurangi Penyesuaian Nilai Persediaan	1.648.350,00
Jumlah	1.251.063.678,00

Rincian pembelian barang persediaan pada tahun berjalan terdapat pada lampiran.

Beban Barang dan
Jasa
Rp244.731.036.263,00

D.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp244.731.036.263,00 dan Rp257.589.343.381,00. Beban Barang dan Jasa adalah beban dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan

Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	KENAIKAN (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	667.834.565,00	886.020.721,00	(24,63)
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	(1.652.000,00)	(1.458.500,00)	(100,00)
Beban Pengadaan Bahan Makanan	90.000.000,00	285.000.000,00	(68,42)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	46.287.000,00	0,00	100
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	557.496.000,00	621.240.000,00	(10,26)
Beban Barang Operasional Lainnya	1.839.219.180,00	1.301.006.509,00	41
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	(1.776.014,00)	(1.440,00)	100
Beban Bahan	14.922.708.748,00	20.130.322.326,00	(25,87)
Pengembalian Beban Bahan	(5.986.040,00)	(9.001.858,00)	(33,50)
Beban Honor Output Kegiatan	8.488.810.000,00	7.561.572.200,00	12,26
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	(44.000.000,00)	(53.250.000,00)	(17,37)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	145.475.467.233,00	164.184.777.508,00	(11,40)
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	(929.000,00)	(15.022.507,00)	(93,82)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	162.977.534,00	(100,00)
Beban Langganan Listrik	2.614.988.357,00	2.193.880.514,00	19,19
Beban Langganan Telepon	30.695.665,00	25.872.906,00	18,64
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4.248.294.379,00	4.098.810.000,00	3,65
Beban Jasa Konsultan	7.466.908.926,00	3.643.295.450,00	104,95
Beban Sewa	9.034.659.419,00	10.219.799.984,00	(11,60)
Pengembalian Beban Sewa	(69.780.496,00)	(2.846.319,00)	2.351,60
Beban Jasa Profesi	20.301.106.000,00	17.520.698.000,00	15,87
Pengembalian Beban Jasa Profesi	(37.634.250,00)	(89.725.265,00)	(58,06)
Beban Jasa Lainnya	29.103.311.591,00	24.879.900.918,00	16,98
Pengembalian Beban Jasa Lainnya	(14.243.000,00)	(6.879.000,00)	107,05
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	51.465.700,00	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	19.250.000,00	888.000,00	100,00
JUMLAH	244.731.036.263,00	257.589.343.381,00	(4,99)

Beban Pemeliharaan
Rp14.552.398.734,00

D.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14.552.398.734,00 dan Rp14.858.982.619,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	KENAIKAN (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.845.377.316,00	7.845.344.797,00	0,00
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	345.383.154,00	345.383.154,00	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.009.898.253,00	1.005.216.060,00	0,47
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.895.189.849,00	4.878.927.228,00	0,33
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(22.459.700,00)	(96.700,00)	23126,16
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	190.634.000,00	(100,00)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	99.806.312,00	16.983.875,00	
Beban Pemeliharaan Jaringan	325.738.404,00	517.672.711,00	(37,08)
Pengembalian Beban Pemeliharaan Jaringan	0,00	(49.506,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Lainnya	48.780.726,00	49.535.360,00	(1,52)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0,00	957.000,00	(100,00)
Beban Persediaan Suku Cadang	4.684.420,00	8.474.640,00	(44,72)
JUMLAH	14.552.398.734,00	14.858.982.619,00	(2,06)

D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
 Dinas
 Rp106.480.688.546,00.

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp106.480.688.546,00 dan Rp96.230.081.445,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	KENAIKAN (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	60.711.438.250,00	58.428.875.552,00	3,91
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(639.226.286,00)	(386.809.292,00)	65,26
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	61.800.000,00	0,00	100,00
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(1.800.000,00)	0,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.426.014.790,00	5.758.303.148,00	(40,50)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	(300.000,00)	(633.750,00)	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	30.428.166.747,00	28.476.789.680,00	6,85
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(139.488.648,00)	(460.524.443,00)	(69,71)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	7.218.371.470,00	2.388.583.930,00	202,20
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	(321.044.200,00)	(3.506.356,00)	100,00
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	5.736.870.923,00	2.035.002.976,00	181,91
Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	(114.500,00)	(6.000.000,00)	(100)
JUMLAH	106.480.688.546,00	96.230.081.445,00	10,65

Terdapat perbedaan senilai Rp146.200.181,00 antara realisasi akun 524111 di LRA senilai Rp59.926.011.783,00 dengan Beban Perjalanan Biasa di LO Rp60.072.211.964,00 berupa tiket voultras koperasi temuan BPK tahun 2022.

D.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp36.712.731.579,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp36.712.731.579,00 dan Rp42.654.586.193,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31
Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	KENAIKAN (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	16.255.655.023,00	21.714.318.834,00	(25,14)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.629.567.519,00	4.512.705.915,00	2,59
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.665.639.536,00	1.690.364.586,00	(1,46)
Beban Penyusutan Irigasi	1.186.806.882,00	1.186.806.882,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	1.066.745.696,00	1.066.745.696,00	0,00
Beban Amortisasi Software	11.310.603.897,00	11.886.395.187,00	(4,84)
Beban Amortisasi Lisensi	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	594.713.026,00	595.749.093,00	(0)
JUMLAH	36.712.731.579,00	42.654.586.193,00	(13,93)

D.3 SURPLUS/(DEFISIT) Pelepasan Aset Non Lancar

Pelepasan Aset Non Lancar adalah pelepasan atas aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar, misalnya aset tetap atau aset tak berwujud. Pelepasan Aset Non Lancar dapat terjadi karena transaksi Penjualan (lelang) atau lainnya.

Pendapatan Dari
Pelepasan Aset Non
Lancar
Rp258.110.374,00.

D.3.1 Pendapatan Dari Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Dari Pelepasan Aset Non Lancar periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp258.110.374,00 dan Rp0,00, yang diterima dari hasil penjualan lelang dengan risalah lelang nomor 104/32/2023 dan nomor 883/32/2023 barang yang dilelang sudah diuraikan di pendapatan.

D.4 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional adalah kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit penjualan Aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Pendapatan Dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp3.658.987.505,00

D.4.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.658.987.505,00 dan Rp3.763.737.553,00.

Tabel 32
Perhitungan dan Perbandingan Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Nilai
Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	17.269.157,00
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	677.862.973,00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	2.963.855.375,00
Jumlah	3.658.987.505,00

Beban dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya
Rp1.648.350,00

D.4.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.648.350,00 dan Rp3.497.000,00. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari beban penyesuaian nilai persediaan.

Surplus/(Defisit) LO
(Rp449.856.633.219,00)

D.5 Surplus/(Defisit) LO

Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing - masing sebesar (Rp449.856.633.219,00) dan (Rp455.451.803.305,00).

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Penjelasan Atas Pos - Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Keuangan *Audited* T.A 2023

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp1.038.661.838.614,00

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.038.661.838.614,00 dan Rp1.072.230.001.317,00.

E.2 Surplus/(Defisit) LO

Surplus/(Defisit) LO
(Rp449.856.633.219,00)

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp449.856.633.219,00) dan (Rp455.451.803.305,00).

E.3 Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang
Menambah/ Mengurangi
Ekuitas
(Rp1.331.468.061,00)

Koreksi yang Mengurangi Ekuitas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp1.331.468.061,00) dan (Rp2.041.257.983,00). Koreksi yang Menambah Ekuitas pada Tahun 2023 terdiri dari Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar (Rp1.331.468.061,00)

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp425.998.288.660,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp425.998.288.660,00 dan Rp423.924.898.585,00 di mana Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas. Transaksi Antar Ekuitas Tahun 2023 terdiri dari Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp426.960.091.164,00 dan Diterima dari Entitas Lain sebesar Rp961.802.504,00.

E.5 Penurunan Ekuitas

Penurunan Ekuitas
(Rp25.189.812.620,00)

Kenaikan/Penurunan Ekuitas yang terdapat pada Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp25.189.812.620,00) dan (Rp33.568.162.703,00).

Ekuitas Akhir
Rp1.013.472.025.994,00

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.013.472.025.994,00 dan Rp1.038.661.838.614,00.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pengungkapan - Pengungkapan Lainnya

Laporan Keuangan *Audited* T.A. 2023

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kegiatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Daerah

Dalam rangka penanganan secara terpusat, terpadu, dan terkoordinasi dengan mengikutsertakan seluruh unsur masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memfasilitasi pembentukan FKPT di daerah. Sampai dengan akhir tahun 2023 telah terbentuk FKPT di seluruh Provinsi di Indonesia. Dalam Peraturan Kepala BNPT Nomor PER-02/K.BNPT/I/2012 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Daerah BAB IV disebutkan bahwa biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas FKPT dibebankan kepada anggaran BNPT, anggaran Pemerintah Daerah, serta anggaran lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023 terdapat pelaksanaan tugas FKPT yang mendapatkan dana dari instansi lain selain BNPT yaitu FKPT Gorontalo yang mendapatkan hibah sebesar Rp125.000.000,00. Pertanggungjawaban dana tersebut, dilaporkan pada instansi yang memberikan dana tersebut selaku pemberi dana.